

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Oleh:
RAMLAH

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Parepare
Email: ikinramlah@gmail.com

ABSTRAK

RAMLAH, 2016. Lahir pada tanggal 12 Maret 1993 di Sidrap. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Adamae dan Ibunda Kasma. Penulis mengambil judul “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dan valid, karena informasi dalam laporan keuangan itu akan dipublikasikan, penelitian ini juga digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi publik dan keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian dilakukan pengambilan data pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Sidenreng Rappang, kemudian diolah dengan bantuan program SPSS. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Bagian Akuntansi, pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan Masyarakat. Jadi jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 kuesioner. Adapun kuesioner tersebut terdiri dari 8 pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang diolah dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Dari hasil analisis menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem informasi keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah, baik dilakukan secara uji T maupun uji nilai probabilitas. Dengan nilai $T\text{-hitung} = 6.954 > T\text{-tabel} = 2.001$ dan nilai $\text{sig} = 0.000 < \alpha = 0.025$ (uji dua sisi) dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

Kata Kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Transparansi Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sampai pada saat ini pemerintah Kab. Sidenreng belum mempublikasikan laporan keuangannya.

Berdasarkan masalah tersebut maka fokus penelitian ini pada Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang ,maka penulis mengemukakan pokok masalah yaitu Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Ilmiah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dan valid, karena informasi dalam laporan keuangan itu akan dipublikasikan.
2. Bagi Praktis
Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan menambah pengetahuan serta wawasan karena dapat menerapkan secara langsung teori yang diperoleh dari bangku kuliah selama ini dengan praktik sebenarnya di perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditebel. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginprestasikan dan mengimplemenasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan internet akan memberikan banyak pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik dibandingkan dengan sistem manual yang beberapa daerah masih menerapkannya.

B. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Sri Wisnu (2007) persepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pemda mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet.
2. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum.
3. Laporan keuangan pemda tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas.

4. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa (auditor) independent.
5. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum.

Transparansi Informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

1. Peranan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan .

Laporan Keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

3. Komponen Dalam Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

fungsi perbendaharaan umum dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Ada beberapa hal yang berbeda dalam pelaporan keuangan pemerintah dari PP No.24 Tahun 2005 ke PP 71 Tahun 2010, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 juga terdapat pada komponen laporan keuangan, dimana pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu : 1. Neraca; 2. Laporan Arus Kas; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Catatan atas Laporan Keuangan. Didalam PP 71 laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemda bertambah menjadi enam (6) jenis laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Opini Atas Laporan Keuangan

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan atas:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Efektivitas Pengendalian Intern;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Pengungkapan yang Lengkap (*Full Disclosure*)

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian masalah dan kajian pustaka di atas, penulis menyusun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: di duga Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pemerintah kab. Sidenreng Rappang.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan kurang lebih 3 bulan terhitung mulai dari bulan Maret 2016 s/d Mei 2016.

B. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Bagian Akuntansi, pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Masyarakat. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Bagian Akuntansi yang terdiri dari 10 orang
2. Pegawai Badan Pengawasan (Bawasda) yang sekarang berganti nama menjadi Inspektorat daerah, dipilih karena mereka bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang daerah telah dilakukan sesuai undang-undang dan

peraturan yang berlaku (Ulum, 2004). Inspektorat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Pegawai inspektorat daerah yang dipilih adalah pegawai yang biasa mengaudit sebanyak 25 orang.

3. Masyarakat sebagai stakeholder pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan pemerintah daerah. Masyarakat memiliki rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam menilai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah, memberi respon atau koreksi apabila ternyata laporan keuangan pemerintah menunjukkan ketidakefektifan kinerja pemerintahan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif mewakili masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yg terdiri dari 25 orang.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang diperlukan sebagai bahan informasi dalam rangka membahas permasalahan yang ditemui serta mencari hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data, yakni:
 - a. Data Kuantitatif, yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang.
 - b. Data Kualitatif, yakni data yang di peroleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang diperoleh pada Kantor Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang.
2. Data Kualitatif, yakni:
 - a. *Person*
Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
 - b. *Paper*
Data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.
 - c. *Place*
Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi langsung yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jalan observasi langsung di lapangan. Maka teknik data yang dipergunakan adalah :

1. Dokumentasi, yakni suatu pengumpulan data dengan melihat atau mencermati dokumen keuangan atau dokumen lain yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
2. Interview atau Wawancara, yakni teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan.
3. Kuisisioner, Teknik kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner, teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Supomo dan Indrianto 2009:40).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab hipotesis yang diajukan dan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif
Menganalisis tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang. Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu , sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier sederhana merupakan salah satu metode uji regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dengan menggunakan program SPSS, analisis ini di gunakan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = Subjek dalam Variabel Independen yang di Prediksikan dalam Hal Ini Sistem Informasi Keuangan Daerah .

a = Konstanta / Intercept

b = Koefisien Regreresi

Y = Transparansi Laporan Keuangan

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan mengintrepretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Skala Likert (interval 5), hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2007) yaitu pada Skala Likert terdapat 1, 2, 3, 4, 5 interval, dari kata “sangat setuju” sampai “sangat tidak setuju”. Dengan skala likert peneliti ingin responden memberikan persepsinya secara jelas, dan sesuai dengan apa yang dirasakan tanpa ada keraguan.

Adapun jumlah pernyataan yang dilampirkan dalam kuesioner adalah 8 Pernyataan. Untuk mengukur variabel Sistem Keuangan Daerah terdiri dari 3 pernyataan dan variabel Transparansi Laporan Keuangan Daerah terdiri dari 5 pernyataan. Dimana setiap pernyataan telah disediakan 5 pilihan jawaban yaitu a) Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, b) Setuju (S) dengan skor 4, c) Cukup Setuju (CS) dengan skor 3, d) Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, e) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsinya dengan cara mencheck list pada kolom masing-masing pernyataan.

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisioner

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari Bagian Akuntansi, Pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan Masyarakat. Sedangkan jumlah keseluruhan sampel nya yaitu:

1. Bagian Akuntansi yang terdiri dari 10 orang.
2. Pegawai Badan Pengawasan (Bawasda) yang sekarang berganti nama menjadi Inspektorat daerah terdiri dari 25 orang.
3. Masyarakat yang terdiri dari 25 orang.

Adapun proses pengumpulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Proses Pengumpulan Data Kuisioner

Kuisioner yang disebar	60	100%
Kuisioner yang kembali	60	100%
Kuisioner valid/ yang diolah	0	100%
Kuisioner yang tidak memenuhi syarat	0	100%

Sumber : Data Diolah (2015)

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah kuisioner yang disebar dan telah kembali dengan jumlah kuisioner yang disebar yaitu 60 kuisioner sedangkan jumlah kuisioner yang kembali yaitu 60 dengan persentase 100%, dan memenuhi syarat untuk diolah.

B. Pengukuran Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan mengintrepretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Adapun pernyataan kuesioner yang diajukan penulis dan hasil dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Jawaban Responden

NO	PERNYATAAN SIKD	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
A	Sistem Informasi Keuangan Daerah mampu untuk menangani proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	16	36	8	0	0
B	Sistem pencatatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan dapat menunjang penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	18	32	10	0	0
C	Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan keuangan pemerintah daerah.	13	34	13	0	0
	Total	47	102	31	0	0

NO	PERNYATAAN TRANSPARANSI	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
D	Pemerintah daerah mempunyai sistem keuangan daerah yang kemungkinan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah untuk masyarakat misalnya melalui internet.	16	32	12	0	0
E	Pertanggungjawaban laporan keuangan untuk Kepala Daerah bersifat terbuka untuk masyarakat umum.	12	26	20	2	0
F	Laporan Pemerintah Daerah tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPR dan auditor tetapi juga untuk masyarakat luas.	10	28	20	2	0
G	Selain DPR dan Bawasda masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diperiksa.	16	29	14	1	0
H	Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut untuk umum.	17	29	14	0	0
	TOTAL	17	144	88	5	0

Sumber: Data Diolah (2016)

C. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel terikat (dependent). Persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (Transparansi Laporan Keuangan Daerah)

X = Variabel bebas (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

a, b = konstanta

Untuk menguji data yang diperoleh peneliti menggunakan bantuan program *Statistical Product Of Services Solusion* (SPSS).

Adapun hasil SPSSnya sebagai berikut :

Tabel 4.3 Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Transparansi Laporan Keuangan	19.95	2.587	60
Sistem Informasi Keuangan Daerah	12.30	1.670	60

Tabel 4.4 Correlations

		Transparansi Laporan Keuangan	Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pearson Correlation	Transparansi Laporan Keuangan	1.000	.674
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	.674	1.000
Sig. (1-tailed)	Transparansi Laporan Keuangan	.	.000
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	.000	.
N	Transparansi Laporan Keuangan	60	60
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	60	60

Tabel 4.5 ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179.524	1	179.524	48.356	.000 ^a
	Residual	215.326	58	3.713		
	Total	394.850	59			

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

Tabel 4.5 ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179.524	1	179.524	48.356	.000 ^a
	Residual	215.326	58	3.713		
	Total	394.850	59			

Tabel 4.6 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.674 ^a	.455	.445	1.927	.455	48.356	1	58	.000

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

Tabel 4.7 Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	7.104	1.864		3.812	.000	3.373	10.836
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	1.044	.150	.674	6.954	.000	.744	1.345

a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

Adapun penjelasan dari tabel-tabel analisis hasil regresi sederhana :

- a. Dari tabel *descriptive statistik* diatas dapat dianalisis.
 - 1) Jumlah responden yang menjadi sampel 60 orang
 - 2) Rata-rata tingkat transparansi sebesar 19,9 dengan standar deviasi sebesar 2,5.
- b. Dari tabel summary diatas dapat dianalisis.
 - 1) Menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara sisitem informasi keuangan daerah dengan transparansi laporan keuangan daerah adalah kuat positif, yaitu $r = 0,674$. Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah. Maksud searah disini adalah semakin bagus/memadai sistem informasi, maka semakin meningkat transparansi.
 - 2) Kontribusi yang diberikan oleh variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X) terhadap variabel Transparansi Laporan Keuangan (Y) sebesar $R.square = 0.455 \times 100\% = 45,5\%$ sisanya 54,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian (dapat dilihat pada tabel Summary).

c. Dari tabel Anova dapat dianalisis.

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat

Ho : model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat transparansi yang dipengaruhi oleh sistem informasi keuangan.

Ha : model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi tingkat transparansi yang dipengaruhi oleh sistem informasi keuangan.

2) Kaidah pengujian.

b) Berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel}

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Dimana F_{hitung} dari tabel Anova sebesar 48,35 dan nilai F_{tabel} sebesar 4,01.

c) Berdasarkan nilai probabilitas.

Jika probabilitas (sig) $> \alpha$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas (sig) $< \alpha$ maka H_0 ditolak.

Dimana dari tabel anova nilai probabilitasnya sebesar 0.000 dan nilai sig sebesar 0.05.

1) Membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} serta nilai Sig dan α .

Ternyata; nilai $F_{hitung} = 48,35 > F_{tabel} = 4,01$ dan nilai Sig = 0.000 $< \alpha = 0.05$

Maka keputusannya H_0 ditolak, H_a diterima.

2) Kesimpulannya adalah :

Model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi tingkat transparansi yang dipengaruhi oleh sistem informasi keuangan.

d. Dari tabel *coefficients* dapat dianalisis, menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat transparansi yang dipengaruhi oleh sistem informasi keuangan adalah:

$Y = 7.104 + 1.044 X$ dimana Y adalah transparansi keuangan, sedangkan X adalah sistem informasi keuangan.

Persamaan regresi **$Y = 7.104 + 1.044 X$** yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat transparansi yang dipengaruhi oleh sistem informasi akan diuji apakah valid.

Untuk menguji kevalidan persamaan regresi digunakan dua cara yaitu:

a. Berdasarkan uji t

Langkah-langkahnya :

1) Membuat hipotesis dalam kalimat

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara sistem informasi keuangan dengan transparansi keuangan.

Ha: Terdapat pengaruh antara sistem informasi keuangan dengan transparansi keuangan.

2) Kaidah pengujian.

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Dari tabel coefficients diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.954 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.001.

3) Membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel}

Ternyata $t_{hitung} = 6.954 > t_{tabel} = 2.001$, kesimpulannya H_0 ditolak.

4) Keputusannya:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

b. Berdasarkan uji nilai probabilitas

Langkah-langkahnya :

1) Membuat hipotesis

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara sistem informasi keuangan dengan transparansi laporan keuangan.

Ha: Terdapat pengaruh antara sistem informasi keuangan dengan transparansi laporan keuangan.

- 2) Menentukan kriteria pengujian.
 Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima
 Jika nilai Sig $\leq \alpha$ maka H_0 ditolak
 Dari tabel *coefficients* nilai Sig sebesar 0.000, nilai α karena uji dua sisi maka $0.005/2 = 0.025$, sehingga jika dibandingkan nilai sig dengan α maka akan nampak bahwa Sig < α
- 3) Keputusannya :
 Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem informasi keuangan dengan transparansi laporan keuangan.

D. Pembahasan

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditebel. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginprestasikan dan mengimplemenasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan internet akan memberikan banyak pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik dibandingkan dengan sistem manual yang beberapa daerah masih menerapkannya.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD 2007) mengacu pada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 2007 mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah.

Menurut Sri Wisnu (2007) persepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pemda mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet.
2. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum.
3. Laporan keuangan pemda tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas.
4. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa (auditor) independent.
5. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum.

Transparansi Informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS dapat diketahui bahwa :

1. Hubungan (korelasi) antara sisitem informasi keuangan daerah dengan transparansi laporan keuangan daerah adalah kuat positif, yaitu $r = 0,674$. Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah. Maksud searah disini adalah semakin bagus/memadai sistem informasi, maka semakin meningkat transparansi.

2. Kontribusi yang diberikan oleh variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X) terhadap variabel Transparansi Laporan Keuangan (Y) sebesar $R.\text{square} = 0.455 \times 100\% = 45,5\%$ sisanya 54,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian (dapat dilihat pada tabel Summary).
3. Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.954. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2.001. Ternyata nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Dan nilai Sig sebesar 0.000, nilai α karena uji dua sisi maka $0.005/2 = 0.025$, sehingga jika dibandingkan nilai sig dengan α maka akan nampak bahwa $\text{Sig} < \alpha$

Keputusannya : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah, baik dilakukan secara uji T maupun uji nilai probabilitas dengan taraf nyata $\alpha=5\%$.

Sehingga hipotesis yang diajukan penulis yakni "Diduga Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kab.Sidenreng Rappang". **Diterima.**

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian ini dengan bantuan program SPSS menunjukkan:

1. Hubungan (korelasi) antara sistem informasi keuangan daerah dengan transparansi laporan keuangan daerah adalah kuat positif, yaitu $r = 0,674$. Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah. Maksud searah disini adalah semakin bagus/memadai sistem informasi, maka semakin meningkat transparansi.
2. Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.954. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2.001. Ternyata nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Dan nilai Sig sebesar 0.000, nilai α karena uji dua sisi maka $0.005/2 = 0.025$, sehingga jika dibandingkan nilai sig dengan α maka akan nampak bahwa $\text{Sig} < \alpha$.

Keputusannya : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah, baik dilakukan secara uji T maupun uji nilai probabilitas dengan taraf nyata $\alpha=5\%$.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran bagi dinas BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan agar selalu meningkatkan transparansi dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah dengan maksimal serta transparan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian tentang transparansi yang mempengaruhi sistem informasi keuangan daerah bisa mengambil variabel lain misalnya peneliti menggunakan variabel efektifitas, akuntabilitas, serta SPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Penulisan dan Penyusunan Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Parepare 2014
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang System Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peggy Sande, 2013, *"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sukhemi, 2010, *"Pengaruh tingka pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah"*, Akmenika UPY, Volume 8, 2011.

Siti Aliyah Dan Aida Nahar, 2012, *"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdatul Ulama.

Budi Mulyono, 2006. *"Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Jurnal, Universitas Gajah Madah Yogyakarta.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 Tentang standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2006 Tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Drs. Nurlan Darise, Ak., M.si, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta.

Bastian, Indra, 2006, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

McLeod. R. dan Schell, G.P., 2008, Sistem Informasi Manajemen, Edisi 10, Prenhallindo, Jakarta.

Jogiyanto, 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.

Sri Wisnu H, 2007. Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang System Informasi Keuangan Daerah.